

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN KARANG POH
KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA**

(Studi Pada Program Pembuatan Telur Asin)

Riko Ismurtanto

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya,

Coperrico@yahoo.com

Abstrak

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2013 mencapai 28,07 juta. Meskipun menunjukkan adanya pengurangan angka kemiskinan disetiap tahunnya, namun angka diatas tidaklah sedikit. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan yang dapat menuntaskan akar masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuan penelitian ini menjelaskan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan khususnya program Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Program ini sendiri sejatinya di implementasikan di Kelurahan Tubanan, dimana pada saat itu Kelurahan Tubanan masih terpisah dengan Kelurahan Karang Poh. Namun pada Tahun 2011 Kelurahan Tubanan sudah di *merger* dengan Kelurahan Karang poh. Program ini sendiri berhenti pada Tahun 2012. Berdasarkan data kemiskinan Kelurahan Karang Poh Tahun 2014 mengatakan bahwa terdapat 679 jiwa masyarakat tergolong miskin dan setengahnya yaitu berjumlah 399 jiwa masyarakat miskin berada di wilayah Tubanan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Fasilitator Kecamatan, Kordinator BKM, KSM setempat terkait pelaksanaan program. Penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perkotaan pembuatan telur asin sudah dapat dikatakan cukup baik, ditunjukkan dari 1) variabel komunikasi diantara implementor sudah terjalin dengan baik; 2) Sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi program telah memadai; 3) Disposisi antar pihak yang terlibat cukup baik; dan 4) Struktur birokrasi pelaksanaan program telah berjalan baik sesuai dengan *Standart Operational Prosedur* (SOP). Penelitian ini merekomendasikan: 1) Perlu adanya pelaksanaan program kembali; 2) Adanya kejelasan tentang bagaimana manajemen pemasaran dan pengelolaan hasil dari usaha pembuatan telur asin ini; 2) Adanya peningkatan konsistensi dari pelaksana program khususnya yang berkenaan dengan cara pembuatan telur asin; 3) Serta Adanya penambahan anggaran dalam pelaksanaan program

Kata Kunci: *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Program pembuatan telur asin*

Abstract

Badan Pusat Statistik (BPS) said the number of poor in Indonesia in March 2013 reached 28.07 million. Although the showed a reduction of poverty every year, but the numbers above are not few. Therefore, prevention efforts are needed that can resolve the root causes of poverty. One of them is policy PNPM Perkotaan. The purpose of this study describes the implementation of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan the Making of telur asin programs in Karang Poh District Tandes Surabaya.

The program its own is actually implemented in the Village Tubanan, which at that time still a separate Tubanan village by Karang Poh Village. But in the year 2011 the Tubanan village already merged with the Karang Poh Village. The program its stops own at the 2012 years. Based on the Karang Poh poverty data in 2014 said that there were 679 people classified as poor communities, and half of that numbered is 399 souls of the poor live in the region Tubanan. This research is descriptive qualitative. Data was collected from Team Facilitators, Coordinator BKM, KSM relevant local implementation of the program. This study in collecting the data by using

observation, interview and documentation. Data analysis techniques used namely Miles and Huberman models

The results of this study indicate that the implementation of PNPM Perkotaan already making salted eggs can be quite good, shown from 1) 1) variable communication between the implementor already well established; 2) The resources needed for the implementation of the program has been inadequate; 3) The disposition between the parties involved is quite good; and 4) the bureaucratic structure of the program has been running well in accordance with the Standard Operational Procedures (SOP). The study recommends: 1) It needs a re-implementation of the program; 2) There is clarity about how marketing management and management of the business of making the results of this salted egg; 2) An increase in the consistency of implementing the program, especially with respect to the manner of making salted eggs; 3) As well as the existence of additional budget in the implementation of the program.

Source : *Analysis of the program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perotaan, The making of telur asin programs*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks yang hampir dialami oleh seluruh negara di dunia ini, tak terkecuali termasuk negara Indonesia. Selama periode September 2012-Maret 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2012 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,39 persen pada Maret 2013. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 14,70 persen pada September 2012 menjadi 14,32 persen pada Maret 2013. Meskipun menunjukkan adanya pengurangan angka kemiskinan, namun angka diatas tidaklah sedikit. Untuk itu, diperlukan upaya penanggulangan yang dapat menuntaskan akar masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan.

Pentingnya masalah pengentasan ini juga dapat kita lihat pada Sasaran Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals* (MDG's), dimana dari 8 point tersebut dapat kita lihat bahwa masalah pengentasan kemiskinan mendapatkan prioritas yang pertama, hal ini menunjukkan betapa fenomena kemiskinan tersebut merupakan suatu fenomena umum yang melanda setiap bangsa.

Adanya komitmen yang kuat oleh pemerintah Indonesia Guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah Indonesia mebuat sebuah program yang diberi nama PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri).

PNPM Mandiri ini sendiri dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Terdapat fenomena yang menarik terkait dengan konsep pemberdayaan ini yang dapat di temui di Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya ini. Dalam observasi awal peneliti mendapatkan sebuah fenomena dimana Kelurahan Karang Poh ini membuat home industri pembuatan telur asin.

Peneliti merasa bahwa kondisi ini sangatlah berbeda dengan implementasi PNPM Mandiri perkotaan di Indonesia pada umumnya yang lebih banyak mengarahkan kepada tercapainya kualitas sarana dan prasarana seperti pavingisasi, pembangunan jembatan, pelebaran jalan, pembangunan WC umum, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Poh ini juga bertujuan untuk mengentas kemiskinan dengan cara yang mandiri yaitu berwira usaha dengan membuat produk makanan berupa telur asin.

PNPM Mandiri Perkotaan Pembuatan Telur Asin ini sendiri sudah berjalan sejak Tahun 2009 dan berhenti pada Tahun 2012. Alasan yang mempengaruhi berhentinya program ini yang didapat dari observasi awal oleh peneliti yaitu dikarenakan kurangnya modal yang diterima untuk membuat usaha ini dalam jumlah yang banyak.

Program ini sendiri sejatinya di implementasikan di Kelurahan Tubanan, dimana pada saat itu Kelurahan Tubanan masih terpisah dengan Kelurahan Karang Poh. Namun pada Tahun 2011 Kelurahan Tubanan sudah di *merger* dengan Kelurahan Karang poh.

Pada tahun 2014, berdasarkan data kependudukan di Kelurahan Karang Poh dimana sebagai hasil dari merger dengan Kelurahan Tubanan menggambarkan bahwa Kelurahan Karangpoh saat ini terdiri dari 55 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW) dengan jumlah penduduk sebanyak 16.365 jiwa dimana 679 jiwa diantara adalah warga miskin. Sebuah temuan yang mengejutkan ketika dari seluruh total warga miskin yang ada di Kelurahan Karang Poh, lebih dari setengahnya yaitu 399 jiwa berasal dari wilayah Tubanan.

Dengan banyaknya RTM di wilayah Tubanan, maka kiranya perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait yaitu Kelurahan Karang Poh agar kemiskinan di wilayah Tubanan dapat teratasi. Salah satu cara yang dirasa relevan untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara pemberian bekal pelatihan untuk berwirausaha seperti yang telah dilakukan warga Tubanan pada tahun 2009 lalu.

Atas dasar pemikiran diataslah maka penelitian tentang **“Analisis Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh”** ini dibuat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan dan menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh.

Pengumpulan dan untuk memperoleh data yang valid, diperlukan data yang lengkap dan akurat sesuai dengan keadaan, sehingga diperlukan teknik yang tepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, antara lain: Wawancara, Studi dokumentasi, Observasi, Triangulasi.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman, meliputi (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, serta (4) menarik kesimpulan,

Pengumpulan Data, dalam proses ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya data yang berkaitan dengan judul penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan.

Menarik kesimpulan (*verifikasi*) adalah Proses untuk menarik kesimpulan dilakukan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan tandes sendiri terletak di wilayah Surabaya Barat dengan beralamatkan di Jl. Kompleks PERUMNAS Balongsari Tandes, Surabaya. Kecamatan Tandes mempunyai luas wilayah 11,07 KM2 dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Asem Rowo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukomanunggal, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sambikerep dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Benowo.

Batas Wilayah	Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Asem Rowo
Sebelah Timur	Kecamatan Sukomanunggal
Sebelah Barat	Kecamatan Benowo
Sebelah Selatan	Kecamatan Sambikerep

Sumber : Demografi Kecamatan Tahun 2012

Kecamatan tandes terdiri dari 7 Kelurahan dimana setiap kelurahan juga melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan dengan berbagai produknya. Namun ada satu kelurahan yang menarik yang melaksanakan program ini, yaitu Kelurahan Karang Poh dengan produknya berupa Pembuatan Telur Asin.

Jumlah Penduduk di wilayah Kelurahan Karang Poh berdasarkan data kependudukan Tahun 2014 sebanyak 16. 365 Jiwa dimana 697

Jiwa didalamnya adalah penduduk miskin dengan RW 01 terdapat 23 orang warga miskin, RW 02 terdapat 7 orang warga miskin, RW 05 terdapat 1 orang warga miskin, RW 06 terdapat sebanyak 285 orang warga miskin, RW 07 terdapat sebanyak 37 Orang warga miskin, di RW 08 sebanyak 40 orang warga miskin dan di RW 09 memperoleh nilai terbanyak yaitu berjumlah 322 orang warga miskin.

Wilayah Tubanan sendiri sebagai hasil dari merger dengan Kelurahan Karang Poh, terletak pada RW 07, RW 08, dan RW 09. Jika seluruh RW yang terdapat di wilayah Tubanan di jumlah, maka hasil yang didapat adalah di wilayah tubanan sendiri terdapat 399 orang warga miskin atau dengan kata lain hampir lebih dari setengahnya warga miskin di Kelurahan Karang Poh terletak di wilayah Tubanan.

Dengan banyaknya warga miskin di wilayah Tubanan inilah, maka kiranya perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait agar kemiskinan di wilayah Tubanan dapat teratasi. Salah satu cara yang dirasa relevan untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara pemberian bekal pelatihan untuk berwirausaha seperti yang telah dilakukan warga Tubanan pada tahun 2009 lalu sebelum di *merger* dengan Kelurahan Karang Poh yaitu dengan pembuatan telur asin.

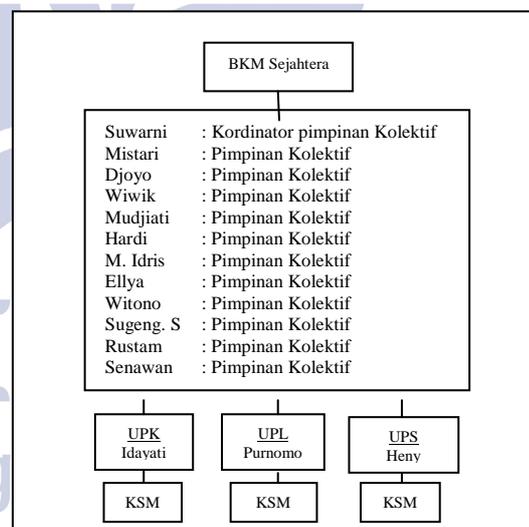
Dalam implementasinya, program ini dipelopori oleh badan lembaga yang dipilih oleh masyarakat sendiri dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. Dilihat dari kedudukannya di masyarakat ialah sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.

Pemilihan keanggotaan pada BKM Sejahtera ini sendiri dilakukan dalam beberapa tahap, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan yang tertuang dalam buku pedoman pelaksanaannya. Tahap awal yaitu penentuan calon anggota BKM, penentuan

anggota BKM ini dilaksanakan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) melalui kegiatan musyawarah. Kriteria anggota yang dipilih berdasarkan rekam jejak masing-masing calon anggota, dimana berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan antara lain bertanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, adil, dan ikhlas. Faktor pendidikan pada setiap calon anggota adalah hanya sebagai tambahan saja.

Setelah calon anggota disetiap RT terpilih, kemudian dibawa ke tingkat RW untuk dilakukan pemilihan kembali. Pada tingkat RW ini pemilihan anggota harus berjumlah ganjil yakni 13 orang. Pemilihan dilakukan secara tertutup dan rahasia melalui musyawarah. Setelah terpilih beberapa orang disetiap RW, kemudian dibawa ke tingkat Kelurahan untuk dilakukan pemilihan kembali menjadi 13 orang anggota. Pemilihan ini dilakukan di kantor Kelurahan dengan didampingi oleh fasilitator Kecamatan serta Kordinator Kota (Korkot) Kota Surabaya, berikut struktur organisasinya BKM Sejahtera :

Gambar 8. Struktur Organisasi BKM Sejahtera



Sumber : Diolah

Pola pendekatan partisipasi secara aktif, partisipasi yang tidak dipaksakan dan partisipasi yang tidak dalam kepura-puraan oleh seluruh komponen masyarakat dalam sebuah kepemimpinan kolektif, kolegal dan demokratis merupakan harapan ideal dari dibentuknya BKM Sejahtera ini kedepan.

Dalam menjalankan perannya dengan mengacu pada Tridaya pembangunan yaitu

dibidang Lingkungan, Sosial, serta Ekonomi, BKM Sejahtera membentuk unit pengelola disetiap masing-masing bidang diatas. Ketiga bidang yang terbentuk ini kemudian disebut dengan Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Ekonomi (UPK).

Berbicara Masalah Program, tentu tidak lepas dari yang namanya dana yang tertuang dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLM). Pemanfaatan dana BLM dapat digunakan sebagai pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif melalui penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta pengembangan usaha-usaha kecil menengah yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, untuk peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta untuk kegiatan sosial seperti pelatihan, beasiswa, dan lain sebagainya.

Untuk program pembuatan telur asin sendiri mendapatkan dana sebesar Rp. 4.261.250,- (*empat juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dimana dana tersebut berupa hibah yang artinya bahwa tidak ada keharusan dalam mengembalikan dana BLM tersebut. Dana BLM senilai Rp. 4.261.250,- tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan baku guna membuat telur asin ini serta pelatihan pembuatan telur asin yang kemudian dibagikan kepada 20 anggota pelaksana program yang kesemuanya adalah masyarakat miskin di Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Pelatihan pembuatan telur asin ini memakan waktu satu hari, dimana pada saat itu yang menjadi pemateri yaitu ibu Anna dan Ibu Mutia selaku tim fasilitator dari Kecamatan Tandes. Pemilihan siapa yang menjadi pemateri ini didasarkan atas pemikiran bahwa mereka berdua sudah menjadi pakar dalam membuat telur asin.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori George Edward III tentang syarat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. George Edward III mengemukakan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar suatu implementasi kebijakan dapat di katakan berhasil yaitu ada empat faktor, yakni Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Untuk itu peneliti menganalisa implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Pembuatan Telur Asin ini dengan mensinkronkan terhadap empat faktor dari George Edward III

1. Komunikasi

Dari segi komunikasi sendiri meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi, faktor transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*impementators*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam hal ini BKM dan UPS membentuk KSM dan kemudian mereka mengadakan musyawarah untuk kemudian menetapkan program pembuatan telur asin dirasa cukup baik untuk kemudian diimplementasikan diwilayah Tubanan, kemudian mereka memilih ke 20 orang warga miskin diwilayah Tubanan dan memberikan sosialisasi tentang program tersebut serta memberi mereka pelatihan. Dengan demikian maka ditemukan adanya transmisi dalam Program ini.

Faktor kejelasan ini menghendaki agar kebijakan - kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk *pelaksana* tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Dari sini faktor ini dirasa tidak memenuhi kriteria, meskipun pada pelatihan dijelaskan tentang bagaimana cara membuat telur asin dan cara menjualnya seperti yang dijelaskan oleh pemateri pelatihan Ibu Anna yang menjelaskan bahwa hasil telur ini nantinya bisa di jual di toko-toko, warung, kedai makanan, atau bahkan pada rapat-rapat ibu PKK dan pengajian rutin. Namun tetap ada kekurangan dimana dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan uang disetiap anggota, serta pemasaran dari hasil olahan telur asin ini. sehingga mengakibatkan tidak meratanya pendapatan masing-masing anggota, seperti yang dialami oleh Ibu Rumi diatas.

Faktor ke 3 yaitu kejelasan, Faktor ini menghendaki perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah *tersebut* bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Dari faktor ini juga ditemui

kelemahan, dimana pada pelatihan dijelaskan Oleh Ibu Mutia bahwa dalam merendam telur yang baik adalah selama 21 hari, ini dimaksudkan agar kualitas telur menjadi bagus dan harganya menjadi lebih mahal. Namun karena faktor lingkungan dimana permintaan sangatlah banyak, maka tidak sedikit ibu-ibu pelaksana program tersebut merendam telur hanya dalam waktu 2 minggu saja, yang mengakibatkan harga jualnya menjadi turun.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam Implementasi Kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi sebiah dokumen saja.

Macam – macam sumberdaya yang dimaksudkan oleh Goerge Edward III disini adalah meliputi Sumber daya Manusia, Sumber Daya Peralatan, Sumber daya Keuangan, serta Sumber daya Informasi dan kewenangan:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (Widodo, 2006:98), menegaskan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian).

Dalam pengimplementasian program ini, faktor ini dirasa terpenuhi sesuai dengan kriteria diatas, dimana sumber daya staff yaitu berjumlah 20 orang, serta masing-masing orang atau anggota ini kemudian diberi pelatihan untuk menambah keahlian mereka dalam membuat telur asin agar mampu menghasilkan telur asin dengan kualitas yang bagus. selain itu pemilihan pemateri dalam pelatihan ini juga berdasarkan keahlian mereka masing-masing, dimana Ibu Anna sudah sektitar 7 Tahun berkecimpung dibidang usaha pembuatan telur asin sedangkan Ibu Mutia sendiri pintar dalam membuat telur asin seperti yang dikatakan oleh Ibu Heny diatas yang menjelaskan bahwa hasil olahan Ibu Mutia telurnya bagus, warnanya sangat kuning dalamnya dan rasanya juga pas, tidak terlalu asin dan masir.

b. Sumber daya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan salah satu sumber daya yang mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sumber dana akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan pelayanan yang diberikan.

Pada Program Pembuatan Telur Asin di Kecamatan Tandes Kelurahan Tubanan ini tersedia dana sebesar Rp. 4.261.250,- guna membeli peralatan dan bahan baku dalam membuat telur asin. Namun dana yang dianggarkan tersebut sangatlah kurang, dimana pada data diatas dijelaskan bahwa guna meningkatkan pendapatan maka mereka hendak menambah banyaknya telur menjadi 200 butir, namun yang disetujui hanyalah 100 butir telur saja oleh BKM Sejahtera. Selain itu, mereka juga batal dalam meminjam dana di UPK dikarenakan harga telur yang naik menjadi Rp. 1.600,- per butir. Untuk itu, dapat diartikan bahwa sebenarnya dana yang dianggarkan diatas adalah kurang, dan kekurangan ini yang mengakibatkan para anggota tersbut tidak dapat menjual dalam jumlah banyak dan hanya mampu memperoleh keuntungan yang sedikit.

c. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan menurut Edward III (Widodo, 2006:102) merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Pada Implementasinya, Ibu-ibu penerima program diberi pelatihan terlebih dahulu, selain itu juga ibu-ibu ini diberi peralatan secara gratis seperti panci kapasitas 20kg, Bak, serbuk batu bata, dan garam. Kesemua peralatan ini guna memproduksi telur asin nantinya.

d. Sumber daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup, yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan. Di samping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat

dalam implementasi agar di antara pelaku kebijakan mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Dalam implementasinya penyediaan informasi tersebut tertuang pada saat pelatihan. Dimana mereka diajari tentang bagaimana cara membuat telur asin yang berkualitas agar mempunyai nilai jual yang tinggi, serta mereka juga diberikan bekal cara berdagang telur dan suka duka dalam menjalani usaha ini yang di berikan oleh Ibu Anna selaku pemateri.

3. Disposisi

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya.

Dalam implementasinya, disposisi atau sikap yang ditunjukkan oleh Ibu-Ibu anggota penerima program tersebut sangat baik, dimana Ibu Mutia menjelaskan bahwa pada saat pelatihan mereka sangat antusias, semua sangat serius melihat dan mendengarkan pemateri dalam menyampaikan materinya. Selain itu hasil dari pembuatan telur asin ini nantinya juga untuk mereka sendiri, maka dari itu mereka sangat antusias sekali.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standart prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

PENUTUP

Simpulan

Analisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tandes Kelurahan Tuabanan tentang Program Pembuatan Telur Asin ini dengan menggunakan pisau analisis dari teori George Edward III, dimana menurut teori tersebut

menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari data yang didapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi komunikasi yang meliputi Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi, dimana dari segi Transmisi nya sudah baik, kemudian dari segi kejelasannya dirasa kurang baik, karena dalam Implementasinya, program ini tidak menjelaskan tentang bagaimana manajemen keuangan dan pemasarannya secara jelas. Serta dari segi konsistensinya juga dirasa kurang baik dimana para pelaksana program tidak menjalankan apa yang diinformasikan oleh pemateri tentang perendaman telur kedalam lumpur yang memakan waktu 21 hari.

Dari segi Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana juga sudah cukup baik, dimana kesemua faktor tersebut ditemui dalam implementasi program PNPM perkotaan di Kecamatan Tandes Kelurahan Tubanan tentang Program Pembuatan Telur Asin ini. Akan tetapi, pada faktor sumber daya keuangan ditemukan adanya kekurangan, yang mengakibatkan para anggota pelaksana program tidak dapat membeli telur dengan jumlah lebih banyak agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak pula.

Dari segi disposisi juga sudah tercukupi, dimana sikap yang ditunjukkan oleh para anggota pelaksana program ini sangat baik dan mereka juga sangat antusias sekali seperti apa yang dikemukakan oleh Ibu Mutia diatas. Kemudian dari segi struktur birokrasi juga sudah jelas tentang siapa yang bertanggung jawab, memberi dana, melaksanakan program dan yang mengawasi jalannya program. Selain itu BKM Sejahtera juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang terdapat dalam Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang berkenaan dengan pembentukan Unit Pelaksana, Pencairan Dana, serta penentuan anggota yang menjadi pemanfaat dalam Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya ini.

Dari penjabaran diatas maka disimpulkan bahwa Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh ini sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini

dikarenakan ke 4 faktor yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi. Namun meskipun demikian, perlu adanya pembenahan, khususnya pada faktor komunikasi yang meliputi faktor kejelasan dan konsistensi. Selain itu faktor sumber daya juga dirasa kurang, khususnya dibidang keuangan, dimana adanya kekurangan anggaran mengakibatkan ibu-ibu pelaksana program ini tidak dapat membeli telur dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Hal ini yang mengakibatkan kemauan dalam menjalankan usaha ini menjadi berkurang, serta mengakibatkan program pembuatan telur asin ini menjadi berhenti

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka perlu kiranya agar program pembuatan telur asin ini diberlakukan lagi. Namun guna mencapai keberhasilan, maka proram ini diperlukan adanya peningkatan lagi disetiap faktor, khususnya faktor komunikasi dan sumber modal. Dari faktor komunikasi misalnya, harus ada kejelasan tentang hasil dari usaha ini, dimana seharusnya hasil dari usaha ini di kumpulkan dan kemudian dibagi rata. Dengan demikian ibu-ibu pelaksana program ini akan bekerja sebagai tim, yang saling membantu bukannya malah bersaing satu sama lain untuk memperoleh keuntungan sendiri-sendiri. Kemudian dari faktor Konsistensi juga harus lebih ditingkatkan kembali. BKM, UPS, Dan LKM juga harus lebih aktif dan tegas dalam mengawasi Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tandes tentang Program Pembuatan Telur Asin di Kelurahan Karang Poh ini, terutama yang berkenaan dengan cara pembuatan telur agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pematery pada saat pelatihan. Serta adanya pembekalan sikap kepada anggota pelaksana bahwa jika mereka lebih sabar dalam merendam telur tersebut, maka nanti hasil jual dari telur tersebut juga akan semakin mahal, sehingga nantinya mereka juga akan memperoleh untung yang jauh lebih tinggi. Kemudian berkenaan dengan masalah anggaran, maka haruslah adanya penambahan. Dengan adanya penambahan ini maka perlu adanya peran aktif dari BKM dan UPS serta LKM untuk mengawasi apakash dana yang telah diberikan telah digunakan sebaik-baiknya. Selain

itu juga perlu dibentuk tim khusus untuk manajemen pemasarannya serta mengolah keuangan dari hasil penjualan telur ini. dengan demikian maka akan jelas dan transparansi tentang berapa hasil dan keuntungan yang didapat, yang kemudian untung dari penjualan tersebut akan dibagikan ke setiap anggota pelaksana masing-masing secara adil merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- DAFLOKPNPM2011
- Hikmat Harry. 2010. *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* Edisi Revisi. Bandung: Humaniora Press.
- Koentjaraningrat. 1991. *METODE-METODE PENELITIAN MASYARAKAT*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugroho Riant. 2004. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- PEDOMAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sulistiyani. 2004. *KEMITRAAN Dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soetomo. 2011. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* Mungkingkah Mucul Antitesisnya. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tangkilisan. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK YANG MEMBUMI Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset &

Yayasan Pembaruan Administrasi
Publik Indonesia.

Trimo Yulianto. 2005. Fenomena Program-
Program Pengentasan Kemiskinan Di
Kabupaten Klaten, Tesis. UNDIP.
Semarang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
dan Perubahannya: Penabur Ilmu

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan
Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

www.bps.go.id



UNESA

Universitas Negeri Surabaya